

## PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGENDALIKAN DINAMIKA POLITIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDOARJO

Ismail<sup>1</sup>, Tri Prasetdjowati<sup>2</sup>, Riska Hidayati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya  
Email : [ismail@ubhara.ac.id](mailto:ismail@ubhara.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya  
Email : [triprasetijowati@ubhara.ac.id](mailto:triprasetijowati@ubhara.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya  
Email : [riskaahidayati16@gmail.com](mailto:riskaahidayati16@gmail.com)

### *Abstract*

*Political dynamics is an illustration of how far the political process is taking place so that it is able to reflect the values of democracy and accountability. With this political dynamics, there will be political movements that emerge because of the internal and external demands of the party as an organized group which is the impact of community interaction. So that it will bring up new regulations as a result of these political movements. This study aims to analyze the role of the DPRD Secretariat in controlling political dynamics in the Sidoarjo Regency DPRD. Then to analyze the factors that influence the DPRD Secretariat in controlling political dynamics in the Sidoarjo Regency DPRD, as well as to analyze the efforts of the DPRD Secretariat in controlling political dynamics in the Sidoarjo Regency DPRD. This study uses qualitative research methods, with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the role of the Sidoarjo Regency DPRD Secretariat in controlling political dynamics in the Sidoarjo Regency DPRD is to provide support for the implementation of the duties and functions of the Sidoarjo Regency DPRD and facilitate all the needs and needs of DPRD members in carrying out their functions, one of which is in the legislative field. As for carrying out its role, the Sidoarjo Regency DPRD Secretariat also has factors that influence its role which consist of inhibiting factors and supporting factors. As well as the efforts made by the Sidoarjo Regency DPRD Secretariat in controlling political dynamics in the Sidoarjo Regency DPRD consisting of 2 ways, namely by optimizing the budget for facilities and infrastructure and increasing employee productivity and capabilities. So that with these efforts can control the political dynamics in the Sidoarjo Regency DPRD.*

**Keywords:** *Political Dynamics, Role, DPRD Secretariat.*

## 1. PENDAHULUAN

Sesuai yang tertera di dalam UUD 1945, di mana UUD 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berkedaulatan rakyat yang menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Maka dari itu, untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, yang di mana

lembaga tersebut dapat diwujudkan dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD adalah suatu lembaga yang dibentuk sebagai lembaga dari perwakilan rakyat dengan pemerintah daerah yang di mana DPRD juga sebagai penyelenggara pemerintah daerah sehingga dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ataupun masalah pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat khususnya mengenai aspirasi/keinginan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa DPRD dibentuk sebagai penyelenggara

pemerintah daerah yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat setempat. Namun pada hakikatnya, masyarakat terus berdinamika. Hal tersebut membuat masyarakat secara individualitas maupun kolektifitas mengalami perubahan, yang di mana perubahan tersebut berupa perubahan sosial, politik, dan budaya. Hal tersebut juga menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai ciri masyarakat yang beragam sehingga mempunyai pola pikir dan perilaku masyarakat yang berbeda pula salah satunya dalam hal demokrasi. Oleh karena itu, hal tersebut lah yang menjadikan adanya sebuah perubahan seperti yang dimaksud.

Dengan adanya keragaman tersebut maka juga membawa keragaman bagi dinamika demokrasi di tingkat daerah. Yang di mana juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat politis, budaya, dan lain-lain. Seiring dengan realitas dinamika yang tercipta dalam sebuah komunitas, paling tidak kita dapat mengerti bahwa suatu dimensi yang telah mengalami perubahan, belum dapat ditentukan atau belum dapat dipastikan bahwa hal ini telah mengalami perubahan secara keseluruhan.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut dalam realitanya selama ini, DPRD belum bisa melakukan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat dengan maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini bisa kita amati dari penetapan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah yang ada selama ini tidak semua kebijakan memihak kepada kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam menetapkan kebijakan yang ada oleh pemerintah. Selain itu, pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) hak untuk berpartisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, untuk memberikan suara atau untuk menduduki suatu jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil yang berkuasa, kaya dan keturunan terpandang. Realitas politik yang seperti ini membuat kita mempertanyakan apa sebenarnya yang melatar belakangi perilaku politik yang seperti ini, sehingga membangun budaya politik yang kokoh dalam realita demokrasi yang sangat mencemaskan di seluruh pelosok Indonesia ini. Dengan demikian, dalam dinamika politik yang ada mempengaruhi perilaku politik.

Dalam mengendalikan politik yang seperti ini tentunya DPRD terkadang tidak dapat mengendalikannya secara baik dalam mencapai tujuannya secara maksimal, maka dalam mengendalikan dinamika politik ini DPRD dibantu oleh staf yang merupakan suatu unsur pelayanan terhadap DPRD. Staf yang diperbantukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membantu DPRD dalam mengendalikan dinamika politik ini. Staff tersebut merupakan bagian dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD sendiri mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan adanya dinamika politik sekarang ini, tentunya DPRD akan mengadakan proses pembuatan keputusan yang baru sehingga dapat merubah keadaan masyarakat juga. Tentunya dalam mengadakan pembuatan keputusan yang baru, DPRD memerlukan bantuan dari Sekretariat DPRD dalam hal ini, yang di mana hal tersebut juga merupakan peran dari Sekretariat DPRD sendiri. Dalam menjalankan administrasinya DPRD membutuhkan Sekretariat DPRD. Misalkan saja pada saat akan mengadakan rapat-rapat di DPRD, maka disitulah peran Sekretariat DPRD dalam menyiapkan rapat tersebut. Dimulai dari pembuatan jadwal rapat/kegiatan undangan bagi peserta rapat, penyiapan risalah rapat, penyiapan administrasi persidangan, serta penyiapan resume rapat dan laporan hasil rapat DPRD. Selain itu Sekretariat DPRD juga berperan dalam pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, penyiapan bahan rancangan peraturan daerah, serta penyiapan bahan pertimbangan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah.

(Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, 2022)

Seperti yang telah dijelaskan diatas, peran Sekretariat DPRD tidak hanya seperti

yang dijelaskan diatas, melainkan Sekretariat DPRD juga berperan sebagai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan fungsi dan haknya yang sesuai dengan kebutuhan, peyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, dan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. (Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, 2022)

Namun berdasarkan prasarvei peneliti menemukan beberapa permasalahan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa belum maksimalnya peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mengendalikan dinamika politik di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Hal itu dapat ditunjukkan dengan masih adanya keluhan pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan yang masih kurang efisien dan efektif, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, juga pada pengkoordinasian perumusan Peraturan Daerah (Perda) masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kemampuan eksekutif dalam pemahaman raperda. Serta yang sehubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah juga dinilai belum maksimal karena terkadang tidak bisa dipenuhi tepat pada waktu yang telah ditentukan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada .

Oleh karena itu, berdasar latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti diatas maka peneliti tertarik untuk mendalami dan meneliti lebih lanjut tentang peran Sekretariat DPRD dalam mengendalikan dinamika politik di DPRD. Sehingga penulis mengangkat judul : **“Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dalam Mengendalikan Dinamika Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo”**.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### a. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung. (Agmarina Vica M. , 2020)

### b. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau bisa juga disebut sebagai sekretariat DPRD adalah suatu unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD sendiri dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional bertanggung jawab atau berada dibawah pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati yang dibina oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD memiliki struktur organisasi yang memudahkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar lebih mudah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (B. R. Rindengan, F. Tulus, dan J. M. Ruru , 2015)

### c. Pengertian Dinamika Politik

Menurut Jatmiko, definisi dinamika politik adalah suatu gerakan yang mendorong terjadinya perubahan sikap perilaku yang dilakukan secara sengaja yang pada akhirnya akan memberikan warna serta perubahan pada pemerintahan. (Dunia Pengertian, 2021)

Dinamika politik adalah suasana politik, keadaan percaturan politik seperti menjelang pemilu atau pilkada. Dinamika politik pada umumnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. (Dunia Pengertian, 2021)

### d. Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Politik

Berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika politik didapatkn dari situasi dan kosndisi sosial kemasayrakan yang ada di dalam masyarakat kita. Beberapa faktor tersebut diantaranya sebagai berikut :

#### a) Pendidikan Politik Masyarakat yang Rendah

Kartaprawira mengartikan pendidikan politik sebagai “upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar merea bisa berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.”

Pendidikan politik sendiri bias menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagi pencapaian pelaksanaan politik di Indonesia. Hal ini dikarnakan pendidikan politik sendiri dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam dunia politik. Semakin tingginya pendidikan politik masyarakat maka dapat menurunkan tingkat apatisme politik di masayrakat. Pendidikan politik sendiri sebenarnya juga erat kaitannya dengan

pendidikan formal, karena hal ini dapat mempengaruhi tingkat dan daya serap masyarakat. Semakin tinggi pendidikan formal yang ditempuh oleh masyarakat maka semakin tinggi pula pendidikan politik yang diketahui oleh masyarakat dan hal tersebut berpengaruh juga terhadap partisipasi politik. Karena dengan adanya hal tersebut maka partisipasi politik yang dilaksanakan akan relatif lebih tinggi.

b) Pengaruh Feodalisme

Feodalisme di Indonesia bisa kita amati dari sejarah kerajaan masa lampau hingga pendudukan para kolonialis Belanda dan Jepang. Dari kebiasaan feodalisme ini yang terjadi secara turun temurun mengakibatkan sistem kehidupan politik di masyarakat menjadi berwarna, karena masyarakat menganggap bahwa orang yang mempunyai jabatan struktural, kepangkatan, dan gelar akademik yang tinggi dianggap sebagai kelompok masyarakat kelas atas, dan selain kelompok tersebut masyarakat menganggapnya sebagai kelas rendah yang hanya dapat menuruti apa yang telah diperintah maupun dilaksanakan oleh para kaum kelas atas semata. Karena kepentingan politik dinasti pada umumnya selalu berupaya menjaga kekuasaannya demi sebagian kecil kelompok yang ada di belakang mereka. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika politik.

c) Moralitas Elit politik

Sebagian besar oknum elit politik masih banyak yang berfokus pada mengejar kekayaan pribadi semata dan kekuasaan kelompok dibandingkan dengan rakyat yang telah memilih mereka. Selain itu, para elit politik juga biasanya telah menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Tentunya hal ini dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan rakyat dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dan tentunya hal tersebut akan mencederai pelaksanaan perpolitikan domestik.

d) Faktor Kultural dan Agama

Dari segi kultural yaitu terdapat dalam aturan adat istiadat yang berada pada kampung adat di seluruh Indonesia. Karena hukum adat tersebut tidak mengarah kepada politik nasional melainkan mengarah kepada aturan adat di daerah tersebut. Yang di mana aturan adat tersebut yaitu kepemimpinan yang berkuasa hanya dapat berlaku terhadap masyarakat yang ada di dalam kampung adatnya sendiri. Dan

sebagian besar masyarakat tersebut tidak terlalu peduli dengan pemerintahan di atasnya. Meskipun hal ini mungkin dianggap kecil, namun ternyata hal ini mempunyai dampak tersendiri bagi perpolitikan nasional.

Dalam segi agama, biasanya sebagian masyarakat Indonesia masih menyalahartikan. Hal ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika politik. Biasanya agama disalahtafsirkan oleh beberapa masyarakat di Indonesia dan digunakan sebagai alat prookasi dan juga jualan politik pada masyarakat, sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan kekacauan tatanan hukum dan pemerintahan yang disebabkan oleh konflik yang bisa terjadi antar umat beragama.

e) Kemajuan Informasi yang Mengarah pada *Misleading*

Kemajuan teknologi/informasi di jaman sekarang telah berkembang dengan pesat, sehingga masyarakat telah familiar dengan berbagai alat elektronik yang ada sekarang seperti ponsel pintar atau komputer atau tablet. Kemajuan teknologi ini sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatifnya sendiri. Dampak positifnya dapat mempermudah dalam hal pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan informasi. Namun selain ada dampak positif tentunya ada dampak negatifnya yaitu jika kontrol dari isi kandungan informasi tersebut kurang, maka dapat menyebabkan kesesatan (*misleading*). Informasi tersebut bisa saja mengarah kepada bentuk-bentuk penghakiman sendiri (*judging*), dan provokasi yang tentunya akan mengarah kepada kebencian atau pertikaian dalam suatu kelompok tertentu yang tentu saja kelompok tersebut bermuatan pada politis. (Rusfiana Yudi, Ismail Nurdin 2017 : 55)

### 3. METODE PENELITIAN

#### Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* (fenomologi), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah yang di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, sedangkan teknik pengumpulan data dan analisis data lebih menekankan pada makna.

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu objek penelitian yang di mana kegiatan penelitian tersebut dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting karena untuk memperjelas objek tujuan yang menjadi sasaran penelitian sehingga permasalahan tidak akan terlalu luas. Dengan demikian, maka penelitian ini dilakukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 39, Pucang, Gajah Timur, Magersari, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

### Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono, batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan adanya fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi fokus dari apa yang akan diteliti oleh peneliti sehingga subjek penelitian menjadi lebih terpusat dan terarah karena sudah jelas batasannya. (Sugiyono 2020 : 274)

Maka fokus penelitian dalam penelitian ini diarahkan pada :

1. Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mengendalikan dinamika politik di DPRD Kabupaten Sidoarjo
  - a. Pengkoordinasian perumusan raperda .
  - b. Proses perumusan perda Kabupaten Sidoarjo
2. Faktor yang mempengaruhi peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mengendalikan dinamika politik di DPRD Kabupaten Sidoarjo
  - a. Faktor Penghambat :
    - 1) Sarana dan Prasarana
    - 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
    - 3) Pengaruh Kekuatan Politik
    - 4) Budaya Politik
  - b. Faktor Pendukung :
    - 1) Motivasi Kerja
    - 2) Sifat-sifat Kepribadian.
3. Upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mengendalikan dinamika politik di DPRD Kabupaten Sidoarjo
  - a. Optimalisasi anggaran yang tersedia
  - b. Meningkatkan produktivitas dan kemampuan pegawai

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini atau lebih tepatnya dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Widodo, 2017 : 50). Dalam penelitian ini teknik wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yang artinya pertanyaan dari pewawancara dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi saat di lapangan. Wawancara tersebut dilakukan kepada staff Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Hamidi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga ataupun organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian (Fenty Himawati 2017 : 60). Dokumentasi sendiri dapat dijadikan bukti konkrit bahwa wawancara yang dilakukan peneliti secara nyata dan tidak ada rekayasa data sedikitpun. Dan juga dapat dijadikan sebagai penunjang data yang sudah ada sebelumnya.

### Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan (Sugiyono 2020 : 318). Metode ini dalam tahap awalnya peneliti melakukan wawancara, lalu dilakukan pengumpulan data hingga mendalam, yang dimulai dari observasi sampai tahap penyusunan laporan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari empat kegiatan, yaitu :

Pertama, kegiatan reduksi data (*data reduction*). Pada kegiatan ini peneliti akan memilih hal-hal mana saja yang bersifat hal pokok dari data yang telah didapatkan dari

lapangan, merangkum dan memfokuskannya kepada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Kedua, penyajian data (*data display*). Kegiatan ini merupakan langkah kedua setelah mereduksi data yang telah didapatkan dari lapangan yaitu mendisplay data. Di dalam kegiatan ini, peneliti menyusun kembali data yang digolongkan berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topik. Lalu topik yang sama dapat disimpan dalam suatu wadah dan setiap wadah tersebut diberi tanda.

Ketiga, data yang telah dikelompokkan pada kegiatan mendisplay data lalu diteliti kembali dengan cermat, dilihat kembali mana saja data yang telah lengkap dan mana saja data yang belum lengkap atau yang masih memerlukan data tambahan lainnya.

Keempat, setelah data dianggap cukup dan telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan yang selanjutnya yaitu menyusun laporan sampai pada akhir pembuatan simpulan. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif. Yang di mana metode tersebut dalam penelitiannya tidak menguji hipotesis (hipotesis kerja hanya digunakan sebagai pedoman) melainkan lebih ke penyusunan abstraksi berdasarkan data yang telah diperoleh dan dikumpulkan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a. Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dalam Mengendalikan Dinamika Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo**

Peran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam perumusan Perda yang dapat mengendalikan dinamika politik yaitu setelah adanya surat masuk dari DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kabupaten menjalankan perannya memberikan fasilitasi untuk jalannya sidang atau rapat. Kemudian Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk keperluan sidang atau rapat, menyiapkan sarana dan prasarana untuk rapat ataupun sidang seperti menyiapkan tempat rapat atau sidang, menyiapkan penyediaan tenaga ahli Alat Kelengkapan DPRD yang salah satunya yaitu Komisi. Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo sendiri memiliki 4 komisi, yaitu Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D,

lalu ada panitia khusus yang membahas tentang Raperda. Hal tersebut merupakan peran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disampaikan oleh Ibu Asfi selaku Staff Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Bagian Persidangan dan Perundang-uuundangan, berikut ini :

“.... Sekretariat DPRD itu perannya memberikan fasilitasi pembentukan Perda. Sebagai fasilitator Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo salah satunya yaitu menerima surat pengajuan Raperda baik dari eksekutif maupun dari inisiatif DPRD. Setelah ada surat masuk, Sekretariat DPRD yang mengumpulkan bahan-bahannya, memberikan fasilitasi rapat yang dibutuhkan dalam pembentukan Perda seperti sarana dan prasarannya, menyiapkan penyediaan tenaga ahli Alat Kelengkapan DPRD seperti Komisi, komisi di DPRD Kabupaten Sidoarjo sendiri ada 4 komisi yaitu Komisi A, B, C, D, kemudian ada panitia khusus yang membahas Raperda.” (Hasil Wawancara 31 Maret 2022).

Di dalam setiap pelaksanaan sidang atau rapat yang membahas produk hukum daerah, anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli, dan tenaga ahli serta staff Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Yang di mana Sekwan sendiri berperan untuk menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam sidang atau rapat tersebut. Dalam pengkoordinasian perumusan raperda sendiri Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo berperan untuk menghadirkan eksekutif pengusul raperda yang di mana eksekutif pengusul tersebut merupakan instansi yang berkaitan dengan raperda yang akan dibahas. Contohnya saja jika dalam rapat atau sidang tersebut akan membahas raperdad tentang Aset Daerah, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo akan menghadirkan instansi yang terkait dengan Aset Daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selain itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo juga mempunyai peran lain yaitu menyediakan sarana dan prasarana rapat, menyediakan bahan materi rapat, menyediakan kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan, serta menyediakan kelompok pakar/tim ahli yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Asfi selaku Staff Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Bagian

Persidangan dan Perundang-uuundangan, berikut ini :

“...Peran Sekwan dalam perumusan raperda yaitu mengumpulkan surat raperda. Surat tersebut dari Bupati sebagai Kepala Daerah. Sedangkan dalam pengkoordinasian perumusan raperdanya Sekwan berperan menghadirkan eksekutif pengusul raperda yang berkaitan dengan raperda yang akan dibahas dalam rapat. Contohnya akan membahas raperda tentang Aset Daerah, maka Sekwan akan menghadirkan instansi yang berkaitan tentang Aset daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selain itu Sekwan juga berperan untuk menyediakan sarana dan prasarana rapat, menyediakan bahan materi rapat, menyediakan kebutuhan tenaga ahli, kelompok paka/tim ahli.” (Hasil Wawancara 31 Maret 2022).

Tenaga Ahli dan Tim Ahli/Kelompok Pakar dalam rapat atau sidang yang dilakukan oleh DPRD mempunyai peran enting dalam mendukung kelancaran keberlangsungan tugas dan fungsi dari DPRD Kabupaten Sidoarjo. Hal ini diakibatkan karena pertimbangan yang dihasilkan oleh Ahli akan menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan bidang akademik yang dimiliki oleh Ahli tersebut.

Dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan Anggota DPRD dalam melakukan fungsinya: salah satunya dibidang Legisalisasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan fasilitas untuk DPRD Kabupaten Sidoarjo agar sidang paripurna berjalan dengan lancar, komunikasi dengan Bupati atau Pememrintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dapat berjalan dengan baik, sehingga akan menghasilkan *output* yang sesuai dengan tujuan bersama. Pada tahun 2021 ada 7 Perda Kabupaten Sidoarjo yang telah diundangkan dan juga 17 keputusan DPRD Kabupten Sidoarjo.

## **b. Faktor yang Mempengaruhi Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Mengendalikan Dinamika Politik di DPRD Kabupaten Sidoarjo**

### **1) Faktor Penghambat**

Dalam menjalankan sebuah peran tentunya selalu ada hal-hal yang menjadi faktor penghambat. Begitu pula dengan Sekretariat

DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan perannya untuk mengendalikan dinamika politik di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Faktor yang menjadi penghambat yaitu sarana dan prasarana pegawai, kurangnya SDM, pengaruh kekuatan politik, dan budaya politik. Hal tersebut seperti keterangan yang diberikan oleh Ibu Diana selaku staf bagian persidangan dan perundang-undangan, berikut ini :

“.....yang menjadi faktor penghambat kami dalam melakukan peran tersebut yaitu sarana dan prasarana untuk pegawai misalnya internet atau ruangan yang tersedia, kurangnya SDM yang ada, pengaruh kekuatan politik, dan budaya politik.” (Wawancara 12 April 2022).

Keadaan fasilitas kerja jika ditinjau dari sarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo sudah memadai, namun tentunya harus ditingkatkan lagi agar dapat menunjang dalam proses kegiatan kantor. Sedangkan jika ditinjau dari tata ruang kantor di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo masih belum mendukung dalam kenyamanan para pegawai, karena dalam satu ruangan masih terdapat banyak barang dan terlihat ramai dan sesak. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kenyamanan kerja para pegawai. Jika suasana kerja tidak nyaman, maka akan menghambat para pegawai dalam bekerja dan hasil kerja yang dikeluarkan menjadi tidak maksimal.

SDM yang dimiliki oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo masih kurang dalam menunjang DPRD dalam melaksanakan tugasnya yang di mana jika dibandingkan dengan lembaga eksekutifnya yaitu Bupati dan Wakil Bupati sangat tidak seimbang. Dengan kemampuan yang minim tersebut akan berpengaruh pada kinerjanya dalam membantu tugas dan fungsi dari DPRD sendiri. Namun jika ditinjau dari segi kualitas SDMnya sudah sangat baik dan sudah berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. Karena SDM yang tersedia tentunya akan sangat berpengaruh dalam organisasi perangkat daerah tersebut seperti pelayanan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pembentukan perda.

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang *vacum* tanpa diisi oleh mereka diberikan

kewenangan untuk itu. karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu.

Budaya politik adalah nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan dari masyarakat tertentu yang diperoleh melalui sosialisasi dan memengaruhi perilaku politik. Akumulasi pengalaman historis dan tradisi dominan di masyarakat akan menentukan tindakan pemerintah yang paling tepat. Perilaku politik DPRD merupakan kendala eksternal karena hal tersebut merupakan perilaku yang sudah menginstitutional di DPRD. Dengan kondisi budaya politik demikian sulit apabila ada anggota DPRD yang kemudian punya inisiasi untuk melakukan upaya-upaya politik yang terhormat menjadi tidak berdaya apa-apa. Keluhan tentang budaya politik demikian banyak diungkap oleh anggota dewan yang masih punya semangat tinggi untuk terus melakukan upaya perubahan-perubahan bagi lingkungan DPRD.

## 2) **Faktor Pendorong**

Dalam menjalankan sebuah peran selain ada faktor penghambat tentunya juga ada hal-hal yang menjadi faktor pendukung. Begitu pula dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan perannya untuk mengendalikan dinamika politik di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendukungnya yaitu sifat-sifat kepribadian dan motivasi kerja. Hal tersebut seperti keterangan yang diberikan oleh Ibu Diana selaku staf bagian persidangan dan perundang-undangan, berikut ini :

“.....selain faktor penghambat tentunya juga ada faktor pendukung yang menjadi pendukung kami dalam melakukan peran tersebut yaitu sifat-sifat kepribadian para pegawai dan juga motivasi kerja pegawai.” (Wawancara 12 April 2022).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, memang para pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo sangat ramah-ramah dan memberikan pelayanan yang baik. Sehingga hal tersebut dapat menciptakan suasana yang aman dan tentram dan dapat berkoordinasi dengan baik antar tiap individu ke individu yang lain maupun tiap bagian ke bagian. Dengan demikian maka bisa dikatakan

bahwa sifat-sifat kepribadian dapat mendukung dalam proses pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi yang diembannya. Karena mengikat rakyat yang merupakan sebagai konstituen yang diwakilinya maka dalam mengambil kebijakan-kebijakan mengenai kepentingan rakyat tentunya akan merasa bertanggungjawab mengenai kepentingan rakyat yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena masyarakat pula yang telah memilih anggota legislatif sehingga ada dalam lembaga tersebut.

Penghasilan merupakan aktor utama yang sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai dalam menjalankan tugasnya. Hal itu dikarenakan pada dasarnya, setiap orang yang bekerja pasti untuk memenuhi kebutuhannya dengan mendapatkan imbalan yang sepadan. Disamping penghasilan, hal lain yang berpengaruh terhadap motivasi yaitu kesejahteraan pegawai. Karena dengan adanya situasi yang sejahtera antar pegawai maka akan sangat berdampak bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik. Bentuk untuk menggerakkan motivasi para pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan memberikan bonus-bonus tambahan lainnya disamping dari penghasilan tetap dan tunjangan yang telah diterima. Selain itu, bentuk motivasi kerja pegawai di Sekretariat DPRD bukan hanya dalam bentuk materi melainkan juga melalui perhatian dan pujian dan juga motivasi yang paling berefek yaitu kesejahteraan.

## c. **Upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Mengendalikan Dinamika Politik di DPRD Kabupaten Sidoarjo**

Dalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengendalikan dinamika politik. Dan dalam mendukung perannya, Sekretariat DPRD juga mengambil porsi agar tujuannya dapat tercapai. Upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD dalam mengendalikan dinamika politik yaitu dengan optimalisasi anggaran yang tersedia, dan meningkatkan produktivitas dan kemampuan pegawai. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Diana selaku staf bagian persidangan dan perundang-undangan berikut ini :

“.....upaya yang kami lakukan yaitu dengan optimalisasi anggaran sarana

dan prasarana yang tersedia dan juga meningkatkan produktivitas dan kemampuan pegawai. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat mengendalikan dinamika politik di DPRD Kabupaten Sidoarjo.” (Hasil wawancara 19 April 2022)

Optimalisasi anggaran sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan membuat skala prioritas pada barang-barang utama yang sering digunakan atau dibutuhkan terlebih dahulu oleh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam menunjang kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan peralatan-peralatan kantor juga dapat dengan cara pengajuan rancangan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo mengajukan rancangan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai masalah penganggaran sarana dan prasarana kantor yang khususnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dan juga dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan adanya pemeliharaan sarana dan prasarana dengan baik maka dapat juga mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Apabila sarana dan prasarana yang ada dirawat dengan baik maka sarana dan prasarana yang tersedia tidak akan rusak dan tidak perlu mengeluarkan biaya karena kerusakan tersebut. Maka hal tersebut sangat berpengaruh kepada pengoptimalisasian anggaran sarana dan prasarana yang tersedia.

Meningkatkan produktivitas dan kemampuan pegawai dapat dilakukan dengan cara memberi kesempatan bagi para pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan bidang kerjanya sehingga hal tersebut dapat menambah keterampilan khusus pegawai tersebut. Cara yang lain yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan pada pegawai untuk melanjutkan pendidikan melalui izin belajar sehingga hal ini dapat menambah peluang pegawai dalam mencapai prestasi yang lebih tinggi.

## **5. KESIMPULAN**

Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mengendalikan dinamika politik yaitu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kabupaten

Sidoarjo juga berperan dalam memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan anggota DPRD dalam melakukan fungsinya, salah satunya di bidang legislatif. Itulah peran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Peran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yaitu menjalankan keadministrasian yang diperlukan oleh DPRD baik dalam pengkoordinasian perumusan raperda maupun dalam proses perumusan perda. Selain itu, peran lain dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yaitu memfasilitasi dan menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sidang atau rapat jika DPRD Kabupaten Sidoarjo sedang melaksanakan sidang atau rapat yang akan membahas produk hukum daerah. Yang di mana dalam sidang atau rapat tersebut membutuhkan bantuan dari kelompok pakar/tim ahli.

Dalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo juga memiliki faktor yang mempengaruhinya. Ada 2 faktor yang mempengaruhi peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Mengendalikan Dinamika Politik di DPRD Kabupaten Sidoarjo yaitu ada faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yang mempengaruhinya yaitu terdiri dari sarana dan prasarana, kurangnya Sumber Daya Manusia, pengaruh kekuatan politik, dan juga budaya politik. Faktor pendukung yang mempengaruhinya yaitu sifat-sifat kepribadian dan motivasi kerja pegawai.

Dalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengendalikan dinamika politik. Dan dalam mendukung perannya, Sekretariat DPRD juga mengambil porsi agar tujuannya dapat tercapai. Upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD dalam mengendalikan dinamika politik yaitu dengan optimalisasi anggaran yang tersedia, dan meningkatkan produktivitas dan kemampuan pegawai.

## **SARAN**

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan mengoptimalkan kinerjanya sehingga masyarakat yang menikmati hasil dari pelaksanaan peran tersebut merasa bangga bahwa mereka tidak memikirkan kepentingan kelompok saja tetapi mereka juga mementingkan kepentingan rakyat.

2. Kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo hendaknya ditingkatkan lagi agar dapat menghasilkan kerja yang maksimal dan baik, yakni selain dengan melakukan program-program yang telah direncanakan, tetapi juga harus diikuti dengan keinginan yang sungguh-sungguh oleh Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas SDM pegawai dan anggaran yang berbasis kinerja.
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam tata ruang kerja hendaknya perlu ditata ulang agar dalam satu ruangan tersebut tidak terlihat sempit karena terlalu banyak pegawai dan barang yang ada di dalam satu ruangan tersebut.

## 6. REFERENSI

- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Produktivitas Tenaga Kerja. <https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/produktivitas-tenaga-kerja-42#:~:text=Pengertian%20produktivitas%20tenaga%20kerja%20Se dangkan,produk%20dari%20seorang%20tenaga%20kerja.> Diakses pada tanggal 29 Mei 2022.
- Dunia pengertian. Pengertian Dinamika Politik. <https://www.duniapengertian.com/2017/08/pengertian-dinamika-politik.html>. Diakses pada tanggal 17 November 2021.
- Etwiory, E. B. (2014). Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, 1(2), 72574. Diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/72574/analisis-kinerja-dprd-kabupaten-maluku-tenggara-dalam-era-otonomi-daerah> pada tanggal 10 April 2022.
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers.
- Juru, N. A. (2020). Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 408-421. Diakses melalui <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/510/190> pada tanggal 10 April 2022.
- Kojongian, R. N. Peranan Staf Sekretariat Dewan dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1065. Diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/1065/peranan-staf-sekretariat-dewan-dalam-menunjang-fungsi-dewan-perwakilan-rakyat-da> pada tanggal 14 November 2021.
- Mayelsa, Agmarina Vica. 2020. *Peran Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Surabaya*. Surabaya. Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Raufur, A. Tafaur Salamun. 2016. *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar. Skripsi Universitas Hasanuddin. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/77629281.pdf> pada tanggal 11 April 2022.
- Ramadhanti, R. (2018). PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENUNJANG KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 248-266. Diakses melalui <https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/viewFile/1472/1080> pada tanggal 14 November 2021.
- RINDENGAN, B. R., Tulus, F., & Ruru, J. M. (2015). Peranan Sekretariat Dprd dalam Mendukung Fungsi Dprd (Studi di Sekretariat Dprd Kota Tomohon). *Jurnal*

- Administrasi Publik*, 4(32).  
Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/9890> pada tanggal 14 November 2021.
- Rosdalina. 2016. *Kedudukan dan Peran Sekretariat Dewan dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015*. Yogyakarta. Skripsi Universitas Islam Indonesia. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/32790/12410282%20Rosdalina.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada tanggal 14 November 2021.
- Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal. Profil Sekretariat DPRD. [https://dprd.kendalkab.go.id/profil/detail/profil\\_sekretariat\\_dprd](https://dprd.kendalkab.go.id/profil/detail/profil_sekretariat_dprd) . Diakses pada tanggal 16 November 2021.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers.